



**JAMKRIDA
KALSEL**

PT. JAMKRIDA KALSEL
Solusi Usahanya Urang Banua

LAPORAN KEUANGAN

&

LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN

31 DESEMBER 2020 DAN 2021



Profesional | Antusias | Sinergi | Terpercaya | Integritas

PT JAMKRIDA KALSEL
LAPORAN KEUANGAN
DAN
LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN

Per 31 Desember 2021 dan Untuk Tahun Yang Berakhir Pada 31 Desember 2021

DAFTAR ISI

	Halaman
Surat Pernyataan Direksi	
Laporan Keuangan	
Neraca	1
Laporan Laba Rugi	2
Laporan Perubahan Ekuitas	3
Laporan Arus Kas	4
Catatan Atas Laporan Keuangan	5
Laporan Auditor Independen	

**SURAT PERNYATAAN DIREKSI
TENTANG TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN KEUANGAN**

31 DESEMBER 2021

PT JAMKRIDA KALSEL

No. 251/1/III/2022

Kami yang bertanda tangan dibawah ini:

1. Nama : Suyanto
Alamat Domisili : Jl. Simpang Adyaksa No 27 A Rt 26 Sungai Miai Banjarmasin
Kalimantan Selatan
Alamat Kantor : Jl. MT. Haryono No. 31 Banjarmasin, 70111
No. Telephone : 08125185508
Jabatan : Direktur Utama
2. Nama : Ariesta Budi
Alamat Domisili : JL. AMD XII Tatah Belayung No 8 Rt 21 Rw 04 Kel. Tanjung
Pagar Kota Banjarmasin Kalsel
Alamat Kantor : Jl. MT. Haryono No. 31 Banjarmasin, 70111
No. Telephone : 0811515451
Jabatan : Direktur

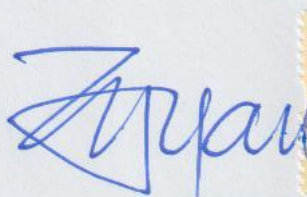
Untuk dan atas nama PT Jamkrida Kalsel menyatakan bahwa:

1. Kami bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan PT Jamkrida Kalsel;
2. Laporan keuangan PT Jamkrida Kalsel Per 31 Desember 2021 dan untuk tahun yang berakhir tanggal tersebut telah disusun dan disajikan berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.
3. a. Semua informasi dalam laporan keuangan PT Jamkrida Kalsel telah dimuat secara lengkap dan benar.
b. Laporan keuangan PT Jamkrida Kalsel tidak mengandung informasi atau fakta material yang tidak benar, dan tidak menghilangkan informasi atau fakta material.
c. Semua dokumen transaksi, catatan keuangan dan pembukuan serta dokumen pendukung telah lengkap disusun dan disimpan oleh PT Jamkrida Kalsel sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
4. Kami bertanggung jawab atas sistem pengendalian internal, pencegahan, dan penanggulangan kecurangan, serta kepatuhan terhadap perundang-undangan yang relevan bagi PT Jamkrida Kalsel.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Banjarmasin, 23 Maret 2022

PT Jamkrida Kalsel


(Suyanto)
Direktur Utama


(Ariesta Budi)
Direktur

Head Officer :

PT. JAMKRIDA KALSEL

Jl. Haryono MT. No.31 Banjarmasin 70111

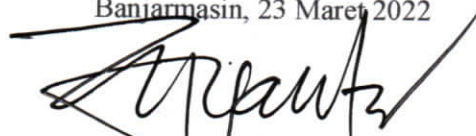
Telp. 0511-6723930 Fax. 0511-6723676, email:jamkridakalsel@gmail.com

PT JAMKRIDA KALSEL
LAPORAN POSISI KEUANGAN
Per 31 Desember 2021 dan 2020

(Dinyatakan dalam rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

	Catatan	31 Desember 2021	31 Desember 2020
ASET			
Kas dan Setara Kas	2e, 3	8,416,002,681	4,958,418,698
Investasi Jangka Pendek	2d, 4	42,887,981,100	60,769,465,500
Piutang Usaha	2f, 5	16,545,340,039	8,529,071,638
Piutang Lain-Lain	2f, 6	345,202,954	166,785,605
Pendapatan Yang Masih Harus Diterima	2o, 7	221,735,092	127,641,337
Beban Dibayar Dimuka	2k, 8	2,263,063,075	1,899,901,094
Total Aset Lancar		70,679,324,941	76,451,283,872
Investasi Jangka Panjang	2d, 9	41,450,931,450	17,996,052,980
Beban Dibayar Dimuka	2k, 8	48,908,293,049	45,097,418,232
Aset Tetap	2g, 10	944,886,094	1,007,789,457
Aset Tidak Berwujud	2j, 11	47,895,832	88,645,829
Aset Pajak Tangguhan		10,221,147	10,221,147
Total Aset Tidak Lancar		91,362,227,572	64,200,127,645
TOTAL ASET		162,041,552,513	140,651,411,517
LIABILITAS DAN EKUITAS			
IJP Yang Ditangguhkan	2n, 12	5,640,502,837	4,278,604,683
Utang Co Guarantee	2n, 13	4,158,813,615	2,504,989,589
Utang Pajak	2r, 14	142,863,485	285,546,439
Utang Komisi	2n, 15	1,048,874,557	48,587,528
Cadangan Claim	2m, 16	5,147,904,057	368,770,354
Liabilitas Lancar Lainnya	17	2,271,875,149	1,823,659,613
Total Liabilitas Jangka Pendek		18,410,833,700	9,310,158,206
IJP Yang Ditangguhkan	2n, 12	63,102,748,143	58,328,538,980
Liabilitas Imbalan Pancakerja	2q, 17	731,199,887	560,731,673
Total Liabilitas Jangka Panjang		63,833,948,030	58,889,270,653
TOTAL LIABILITAS		82,244,781,730	68,199,428,859
Modal Saham	19	82,020,000,000	70,020,000,000
Cadangan Umum	19	97,853,522	-
Cadangan Tujuan	19	609,267,610	-
Saldo Laba (Rugi)	19	(2,913,207,028)	2,437,070,438
Pendapatan Komprehensif Lainnya	19	(17,143,321)	(5,087,780)
Total Ekuitas		79,796,770,783	72,451,982,658
TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS		162,041,552,513	140,651,411,517

Banjarmasin, 23 Maret 2022


(Suyanto)
Direktur Utama


(Ariesta Budi)
Direktur

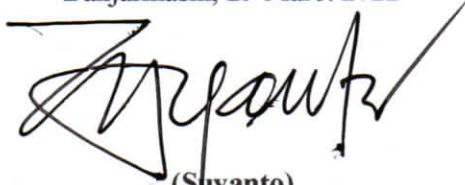
LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN

Untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2021 dan 2020

(Dinyatakan dalam rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain).

	Catatan	2021	2020
PENDAPATAN			
Pendapatan Imbal Jasa Penjamin Bruto	2o, 20	11,998,644,058	11,079,495,517
Pendapatan Komisi Penjaminan Bersih	2o, 20	449,848,966	396,041,329
		12,448,493,024	11,475,536,846
Beban Klaim	21	(15,432,911,926)	-11,780,488,009
PENDAPATAN PENJAMINAN BERSIH		(2,984,418,902)	(304,951,163)
PENDAPATAN OPERASIONAL LAINYA			
Pendapatan Bunga Jasa Giro	2o, 22	103,440,406	105,562,454
Pendapatan Bunga Deposito	2o, 22	1,228,419,897	2,375,173,809
Pendapatan Bunga Obligasi	2o, 22	1,070,574,040	1,217,844,775
Pendapatan Reksadana	2o, 22	212,494,550	240,712,056
Pendapatan Dividen	2o, 22	196,223,668	16,069,250
Pendapatan Selisih Trading Obligasi	2o, 22	1,775,666,182	1,240,306,364
Pendapatan Lain-lain	2o, 22	106,018,098	36,900,212
Agio Saham	2o, 22	1,482,084,406	2,052,747,775
Pendapatan Kelebihan Cadangan Klaim	2o, 22	-	347,800,002
Total Pendapatan Operasional Lainnya		6,174,921,248	7,633,116,697
BEBAN OPERASIONAL			
Beban Tenaga Kerja	2p, 23	(4,572,254,242)	-3,243,930,117
Beban Penyusutan dan Amortisasi	2p, 23	(777,928,910)	-886,293,256
Beban Administrasi dan Umum	2p, 23	(1,964,820,818)	-1,416,508,277
Beban Operasional Lain-lain	2p, 23	(42,244,205)	-42,301,238
Total Beban Operasional		(7,357,248,175)	-5,589,032,888
LABA OPERASIONAL		(4,166,745,829)	1,739,132,646
PENDAPATAN DAN BEBAN NON OPERASIONAL			
Pendapatan Non Operasional	2o, 24	1,253,538,801	1,319,218,652
Beban Non Operasional	2p, 24	-	-
Total Pendapatan dan Beban Non Operasional		1,253,538,801	1,319,218,652
LABA SEBELUM PAJAK PENGHASILAN		(2,913,207,028)	3,058,351,298
Pajak Kini	2r, 14	-	-176,704,372
LABA TAHUN BERJALAN		(2,913,207,028)	2,881,646,926
Keuntungan (Kerugian) Aktuarial		(12,055,541)	-12,762,986
LABA KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN		-2,925,262,569	2,868,883,940

Banjarmasin, 23 Maret 2022


 (Suyanto)
 Direktur Utama


 (Ariesta Budi)
 Direktur

PT JAMKRIDA KALSEL
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
 Untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2021 dan 2020

(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	Modal	Saldo Laba				Other Comprehensif Lain	Jumlah
	Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	Cadangan Tujuan	Cadangan Umum	Belum Ditentukan	Jumlah		
Saldo per 31 Desember 2019	70.020.000.000	-	-	(431.813.502)	69.588.186.498	7.675.206	69.595.861.704
Tambahan Cadangan Umum	-	-	-	-	-	-	-
Rugi aktuarial imbalan pasca kerja	-	-	-	-	-	(12.762.986)	(12.762.986)
Laba rugi tahun berjalan	-	-	-	2.881.646.926	2.881.646.926	-	2.881.646.926
Saldo per 31 Desember 2020	70.020.000.000	-	-	2.449.833.424	72.469.833.424	(5.087.780)	72.464.745.644
Tambahan Cadangan Umum	-	-	97.853.522	(97.853.522)	-	-	-
Cadangan Tujuan	-	609.267.610	-	(609.267.610)	-	-	-
Tambahan Modal Disetor	12.000.000.000	-	-	-	12.000.000.000	-	12.000.000.000
Pembagian Dividen	-	-	-	(1.742.712.292)	(1.742.712.292)	-	(1.742.712.292)
Rugi aktuarial imbalan pasca kerja	-	-	-	-	-	(12.055.541)	(12.055.541)
Laba rugi tahun berjalan	-	-	-	(2.913.207.028)	(2.913.207.028)	-	(2.913.207.028)
Saldo per 31 Desember 2021	82.020.000.000	609.267.610	97.853.522	(2.913.207.028)	79.813.914.104	(17.143.321)	79.796.770.783

PT JAMKRIDA KALSEL**LAPORAN ARUS KAS**

Untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2021 dan 2020

(Dinyatakan dalam rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

	2021	2020
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI		
Penerimaan kas Imbal Jasa Penjaminan	5.413.959.768	10.652.818.111
Penerimaan Jasa Giro, dan Bunga Deposito	6.174.921.248	7.633.116.697
Penerimaan Lainnya	-	1.715.259.981
Pembayaran Klaim Kepada Penerima Jaminan	(7.425.977.922)	(15.357.033.036)
Pembayaran Kepada Karyawan	(4.572.254.242)	(3.243.930.117)
Pembayaran pajak penghasilan	(142.682.954)	72.346.708
ARUS KAS BERSIH DARI AKTIVITAS OPERASI	(552.034.103)	585.576.814
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI		
Penjualan (Penempatan) Investasi	(5.573.394.070)	4.524.472.111
Pembelian aset tetap	(674.275.550)	(1.381.667.865)
Penghapusan Aset tetap	-	138.277.517
ARUS KAS BERSIH DARI AKTIVITAS INVESTASI	(6.247.669.620)	3.281.081.763
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN		
Dividen	(1.742.712.292)	-
Penerimaan Setoran Modal	12.000.000.000	-
Penghasilan komprehensif lain	-	(12.762.986)
ARUS KAS BERSIH DARI AKTIVITAS PENDANAAN	10.257.287.708	(12.762.986)
KENAIKAN (PENURUNAN) ARUS KAS	3.457.583.984	3.853.895.591
KAS AWAL PERIODE	4.958.418.697	1.104.523.106
KAS AKHIR PERIODE	8.416.002.681	4.958.418.697

PT JAMKRIDA KALSEL**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2021

(Dinyatakan dalam rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

1. GAMBARAN UMUM**a. Pendirian Perusahaan**

PT Jamkrida Kalsel didirikan berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 15 Tahun 2012 tentang Perusahaan Penjaminan Kredit Daerah Kalimantan Selatan tanggal 4 Oktober 2012 dan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 15 Tahun 2013 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan Kepada Perusahaan Penjamin Kredit Daerah Kalimantan Selatan tanggal 16 Desember 2013 yang diundangkan pada tanggal 17 Desember 2013.

Pendirian PT Jamkrida Kalsel disahkan dengan Akta Notaris Linda Kenari, SH, MH, Notaris di Banjarmasin dengan salinan Akta Tanggal 06 Desember 2013 No. 28 tentang Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT Jamkrida Kalsel, dan telah mendapat pengesahan badan hukum dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-05101, AH.01.01. Tahun 2014 tentang Pengesahan Badan Hukum Perseroan tanggal 06 Februari 2014.

Pendirian perusahaan ini didirikan oleh Tim Khusus yang diberi nama Tim Khusus Pendirian Perusahaan Penjaminan Kredit Daerah Kalimantan Selatan, dengan susunan sebagai berikut :

No.	Jabatan / Nama Dalam Dinas / Instansi	Nama Jabatan Dalam Tim
1	Gubernur Kalimantan Selatan	Pembina
2	Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Selatan	Pengarah
3	Asisten Pembangunan Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Selatan	Penanggung Jawab
4	Kepala Biro Perekonomian	Ketua
5	Bagian Kepala Sarana Perekonomian	Sekretaris
6	Kepala Dinas Koperasi dan UKM	Anggota
7	Kepala Biro Hukum	Anggota
8	Kepala Biro Keuangan	Anggota
9	Kasubag Investasi BUMD dan Perbankan Daerah	Anggota
10	Budi Rahardjo/ Bank Indonesia	Anggota
11	M. Fauzan, SE, MEP / Bank Kalsel	Anggota
12	Drs. Ec. H. Atma Hayat, M.Si, Ak / Unlam	Anggota
13	P. Doloksaribu / LP2UMKM	Anggota
14	Akhmad Muhaidi, SE / Perbamida	Anggota
15	Mardiana Dana	Sekretaris
16	Siti Sejuk Justitia, SE	Sekretaris

Pendirian perusahaan ini juga mendapat izin dari OJK (Otoritas Jasa Keuangan) dengan salinan keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor : Kep-22/D.05/2014 tentang Pemberian Izin Usaha Perusahaan Penjaminan Kredit Kepada PT Jamkrida Kalsel tanggal 17 Maret 2014.

b. Tempat dan Kedudukan

Dalam untuk menunjang pelaksanaan kegiatan administrasi dan manajemen sehari-hari, PT Jamkrida Kalsel menggunakan kantor yang berlokasi di Jl. MT. Haryono No. 31 Banjarmasin, 70111, No. Telp (0511) 6723930 dan Fax (0511) 6723676.

PT JAMKRIDA KALSEL

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2021

(Dinyatakan dalam rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

1. GAMBARAN UMUM (Lanjutan)

d. Maksud dan Tujuan

Berdasarkan Anggaran Dasar Perseroan pasal 3 dijelaskan maksud dan tujuan perusahaan adalah sebagai Perusahaan Penjaminan Konvensional dan Unit Usaha Syariah Perusahaan Penjaminan.

Untuk mencapai maksud dan tujuan perusahaan, perusahaan melaksanakan kegiatan usaha perbankan yang lingkungannya meliputi:

- 1) penjaminan Kredit, Pembiayaan, atau Pembiayaan Berdasarkan Prinsip Syariah yang diberikan oleh Lembaga Keuangan;
- 2) penjaminan pinjaman yang disalurkan oleh koperasi simpan pinjam atau koperasi yang mempunyai unit usaha simpan pinjam kepada anggotanya
- 3) penjaminan Kredit dan/atau pinjaman program kemitraan yang disalurkan oleh badan usaha milik negara dalam rangka program kemitraan dan bina lingkungan
- 4) penjaminan atas surat utang;
- 5) penjaminan pembelian barang secara angsuran
- 6) penjaminan transaksi dagang
- 7) penjaminan pengadaan barang dan/atau jasa (surety bond)
- 8) penjaminan bank garansi (kontra bank garansi)
- 9) penjaminan surat kredit berdokumendalam negeri
- 10) penjaminan letter of credit;
- 11) penjaminan kepabeanan (customs bond)
- 12) penjaminan cukai;
- 13) pemberian jasa konsultasi manajemen terkait dengan kegiatan usaha Penjaminan; dan
- 14) kegiatan usaha lainnya setelah mendapat persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan

e. Kepemilikan Perusahaan

Komposisi kepemilikan saham, sesuai dengan Pasal 6 Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 15 Tahun 2012 tentang Perusahaan Penjaminan Kredit Daerah Kalimantan Selatan, pemegang saham perusahaan terdiri dari :

1. Pemerintah Daerah, paling sedikit sebesar 51% ; dan
2. Pemegang saham lainnya, paling tinggi sebesar 49%.

Sesuai dengan Pasal 15 Ayat 4 Akta Pendirian, modal dasar perseroan berjumlah Rp 200.000.000.000,00 (dua ratus milyar rupiah), terdiri dari 20.000 (dua puluh ribu) lembar saham, masing-masing saham bernilai nominal Rp 10.000.000 (sepuluh juta rupiah).

Dari modal dasar tersebut telah ditempatkan dan disetor sejumlah 5.000 (lima ribu) lembar saham, dengan nominal seluruhnya sebesar Rp 50.020.000.000,00 (lima puluh milyar dua puluh juta rupiah) oleh para pemegang saham yang telah mengambil bagian saham.

Penyertaan modal dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan sebesar Rp50.000.000.000,00 ditetapkan dengan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 15 Tahun 2013 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan Kepada Perusahaan Penjaminan Kredit pada tanggal 16 Desember Pada tahun 2016 terdapat tambahan modal disetor sebanyak 2.000 (dua ribu) lembar dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan dengan nilai sebesar Rp20.000.000.000,00 (dua puluh milyar). Sehingga komposisi modal saham menjadi sebagai berikut:

PT JAMKRIDA KALSEL**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2021

*(Dinyatakan dalam rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)***1. GAMBARAN UMUM (Lanjutan)****e. Kepemilikan Perusahaan (lanjutan)**

Pada tanggal 24 Nopember 2021 perusahaan melakukan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) yang dituangkan dalam akta nomor 15 tanggal 24 Nopember 2021. dalam RUPS-LB para pemegang saham menyetujui untuk mengesahkan dan mengeluarkan sebagian saham sebagai tambahan modal disetor sebanyak 1.200 (dua ribu) lembar dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan dengan nilai sebesar Rp12.000.000.000,00 (dua puluh milyar). Sehingga komposisi modal saham menjadi sebagai berikut:

Nama Pemilik (Pemegang Saham)	2021		
	Jumlah Lembar Saham	Persentase	Nilai
Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan	8.200	99,98%	82.000.000.000
Koperasi Karyawan Bank BPD Kalsel	2	0,02%	20.000.000
Total	8.202	100%	82.020.000.000

Nama Pemilik (Pemegang Saham)	2020		
	Jumlah Lembar Saham	Persentase	Nilai
Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan	7.000	99,97%	70.000.000.000
Koperasi Karyawan Bank BPD Kalsel	2	0,03%	20.000.000
Total	7.002	100%	70.020.000.000

f. Dewan Komisaris, Direksi, dan Karyawan

Sesuai dengan Pasal 11 ayat (1) Akta Pendirian, dinyatakan bahwa Peseroan diurus dan dipimpin oleh Direksi, yang terdiri dari seorang Direktur atau lebih, apabila diangkat lebih dari seorang Direktur maka salah seorang diantaranya dapat diangkat sebagai Direktur Utama. Sesuai dengan Pasal 11 ayat (1) Akta Pendirian, dinyatakan bahwa Komisaris terdiri dari seorang Komisaris atau lebih anggota Dewan Komisaris, apabila diangkat lebih dari seorang anggota Dewan Komisaris, maka seorang diantaranya dapat diangkat sebagai Komisaris Utama.

Pada tahun 2021 perusahaan melaksanakan RUPS-LB yang dituangkan dalam akta nomor 9 tanggal 9 september 2021, dan menetapkan susunan dewan komisaris dan direksi tahun 2021 adalah sebagai berikut:

PT JAMKRIDA KALSEL**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2021

*(Dinyatakan dalam rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)***1. GAMBARAN UMUM (Lanjutan)****f. Dewan Komisaris, Direksi, Dewan Pengawas, dan Karyawan (lanjutan)**

	2021	2020
<u>Dewan Komisaris</u>		
Komisaris Utama	Tn. Roy Rizali Anwar. ST.	Tn. Fitriyadi
Komisaris	Tn. Muhammad Syachrieza Aufa,	Tn. Muhammad Syachrieza Aufa, SE
<u>Direksi</u>		
Direktur Utama	Tn. Suyanto	Tn. Suyanto
Direktur	Tn. Ariesta Budi	Tn. Ariesta Budi
<u>Dewan Pengawas Syariah</u>		
Dewan Pengawas Syariah	Tn. Abdul Halim Barkatullah	Tn. Zurkani, S.Sos

Per 31 Desember 2021 dan 2020 jumlah karyawan perusahaan masing-masing sebanyak 21 Orang Karyawan (tidak diaudit) dan 22 Orang Karyawan (tidak diaudit).

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI**a. Kepatuhan Terhadap Standar Akuntansi Keuangan Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK-ETAP)**

Laporan keuangan telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) di Indonesia, yang diterbitkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan-Ikatan Akuntan Indonesia (DSAK-IAI).

b. Dasar Pengukuran dan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan keuangan disusun berdasarkan prinsip kesinambungan usaha dengan konsep harga perolehan kecuali beberapa akun tertentu yang didasarkan pengukuran lain sebagaimana dijelaskan dalam kebijakan akuntansi masing-masing akun tersebut.

Laporan arus kas disusun dengan metode langsung (direct method), dan arus kas dikelompokkan atas dasar aktivitas operasi, investasi dan pendanaan.

Mata uang pelaporan yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan ini adalah Rupiah.

c. Transaksi Dengan Pihak Berelasi

Perusahaan mempunyai transaksi dengan pihak berelasi. Definisi pihak berelasi sesuai dengan yang diatur dalam PSAK 7 "Pengungkapan Pihak-pihak Berelasi".

Seluruh transaksi yang material dengan pihak berelasi telah diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan Keuangan.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI (Lanjutan)

d. Aset Keuangan

Seluruh aset keuangan diakui dan dihentikan pengakuannya pada tanggal diperdagangkan dimana pembelian dan penjualan aset keuangan berdasarkan kontrak yang mensyaratkan penyerahan aset keuangan dalam kurun waktu yang ditetapkan oleh kebiasaan pasar yang berlaku, dan awalnya diukur sebesar nilai wajar ditambah biaya transaksi, kecuali untuk aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi, yang awalnya diukur sebesar nilai wajar.

Aset keuangan Perusahaan diklasifikasikan ke dalam salah satu dari kategori berikut ini

1) Aset keuangan pada nilai wajar melalui laba rugi (*Fair Value to Profit and Loss-FVTPL*)

Aset keuangan diklasifikasi dalam FVTPL, jika aset keuangan dimiliki untuk diperdagangkan, sebagai Efek Diperdagangkan, atau ditetapkan sebagai FVTPL.

Aset keuangan diklasifikasi sebagai kelompok diperdagangkan, jika:

- diperoleh atau dimiliki terutama untuk tujuan dijual kembali dalam waktu dekat; atau
- pada pengakuan awal merupakan bagian dari portofolio instrumen keuangan tertentu yang dikelola secara bersama dan mempunyai pola ambil untung dalam jangka pendek aktual saat ini; atau
- merupakan derivatif yang tidak ditetapkan dan tidak efektif sebagai instrumen lindung nilai.

Aset keuangan selain aset keuangan yang diperdagangkan, dapat ditetapkan sebagai FVTPL pada saat pengakuan awal, jika

- penetapan tersebut mengeliminasi atau mengurangi secara signifikan ketidak konsistenan pengukuran dan pengakuan yang dapat timbul; atau
- kelompok aset keuangan, liabilitas keuangan atau keduanya, dikelola dan kinerjanya dievaluasi berdasarkan nilai wajar, sesuai dengan manajemen risiko atau strategi investasi yang didokumentasikan, dan informasi tentang Perusahaan disediakan secara internal kepada manajemen kunci entitas misalnya Direksi.

Aset keuangan FVTPL disajikan sebesar nilai wajar, keuntungan atau kerugian yang timbul diakui dalam laba rugi. Keuntungan atau kerugian bersih yang diakui dalam laba rugi mencakup dividen atau bunga yang diperoleh dari aset keuangan. Nilai wajar ditentukan.

2) Aset keuangan diukur pada biaya perolehan diamortisasi

Perusahaan mengklasifikasikan aset keuangan diukur pada biaya perolehan diamortisasi jika kondisi berikut ini terpenuhi:

- i. Aset keuangan dikelola dalam model bisnis yang bertujuan untuk memiliki aset keuangan dalam rangka mendapat arus kas kontraktual dan
- ii. Persyaratan kontraktual dari aset keuangan menghasilkan arus kas pada tanggal tertentu yang semata dari pembayaran pokok dan bunga dari jumlah pokok terutang.

3) Aset keuangan diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain (*Fair Value to Other Comprehensive Income-FVTOCI*)

Aset keuangan diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain jika kedua kondisi tersebut terpenuhi:

- i. Aset keuangan dikelola dalam model bisnis yang tujuannya akan terpenuhi dengan mendapatkan arus kas kontraktual dan menjual aset keuangan dan

PT JAMKRIDA KALSEL

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2021

(Dinyatakan dalam rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI (Lanjutan)

d. Aset Keuangan (lanjutan)

- ii. Persyaratan kontraktual dari aset keuangan menghasilkan arus kas pada tanggal tertentu yang semata dari pembayaran pokok dan bunga dari jumlah pokok terutang.

e. Nilai Wajar

Nilai wajar adalah harga yang akan diterima untuk menjual suatu aset atau harga yang akan dibayar untuk mengalihkan suatu liabilitas dalam transaksi teratur antara pelaku pasar pada tanggal pengukuran tanpa memperhatikan apakah harga tersebut dapat diobservasi secara langsung atau diestimasi menggunakan teknik penilaian lain. Dalam mengukur nilai wajar atas suatu aset atau liabilitas pada tanggal pengukuran, Perusahaan memperhitungkan karakteristik suatu aset atau liabilitas jika pelaku pasar akan memperhitungkan karakteristik Dalam rangka konsistensi dan perbandingan dalam pengukuran nilai wajar dan pengungkapan terkait, Perusahaan melakukan pengukuran nilai wajar atas instrumen keuangan yang dimiliki dengan hirarki berikut:

- 1) Pengukuran nilai wajar level 1 adalah yang berasal dari harga kuotasian (tanpa penyesuaian) dalam pasar aktif untuk aset atau liabilitas yang identik; dimana Perusahaan dapat mengakses pada tanggal pengukuran;
- 2) Pengukuran nilai wajar level 2 adalah yang berasal dari input selain harga kuotasian yang termasuk dalam level 1 yang dapat diobservasi untuk aset atau liabilitas, baik secara langsung (misalnya harga) atau secara tidak langsung (misalnya deviasi dari harga); dan
- 3) Pengukuran nilai wajar level 3 adalah yang berasal dari teknik penilaian yang mencakup input untuk aset atau liabilitas yang bukan berdasarkan data pasar yang dapat diobservasi (input yang tidak dapat diobservasi)

e. Kas dan Setara Kas

Untuk tujuan penyajian arus kas, kas dan setara kas terdiri dari kas, bank dan semua investasi yang jatuh tempo dalam waktu tiga bulan atau kurang dari tanggal perolehannya dan yang tidak dijaminan serta tidak dibatasi penggunaannya.

f. Piutang

Piutang usaha merupakan piutang kepada pihak ketiga atau mitra *re/co guarantee*, pengakuan piutang dilakukan setiap terjadi pembayaran klaim ke penerima jaminan yang menjadi tanggungan mitra dicatat sebagai piutang *co guarantee*.

Piutang diakui sebagai piutang *coguarantee* tatkala mitra *co guarantee* mengkasapi piutang tersebut (sesuai dengan jangka waktu dalam Perjanjian Kerja Sama antara PT Jamkrida Kalsel dengan mitra *co guarantee*), namun pembayaran belum dilakukan.

Piutang usaha disajikan sebesar nilai wajarnya.

PT JAMKRIDA KALSEL**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2021

(Dinyatakan dalam rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI (Lanjutan)**g. Aset Tetap**

Tanah dan bangunan dinyatakan berdasarkan nilai revaluasi yang merupakan nilai wajar pada tanggal revaluasi dikurangi akumulasi penyusutan dan akumulasi rugi penurunan nilai yang terjadi setelah tanggal revaluasi, kecuali tanah yang tidak disusutkan. Revaluasi dilakukan dengan keteraturan yang memadai untuk memastikan bahwa jumlah tercatat tidak berbeda secara material dari jumlah yang ditentukan dengan menggunakan nilai wajar pada tanggal laporan posisi keuangan.

Kendaraan bermotor dan peralatan dan perlengkapan kantor dicatat berdasarkan biaya perolehan setelah dikurang akumulasi penyusutan dan akumulasi kerugian penurunan nilai.

Penyusutan diakui sebagai penghapusan biaya perolehan aset dikurangi nilai residu dengan menggunakan metode saldo menurun ganda, kecuali untuk bangunan dan prasarana kantor dihitung dengan menggunakan metode garis lurus berdasarkan taksiran masa manfaat ekonomis aset tetap sebagai berikut:

Kelompok Aset	Tarif	Masa Manfaat
Bangunan	5,0%	20 Tahun
Kendaraan Roda Dua	25,0%	4 Tahun
Kendaraan Roda Empat	12,5%	8 Tahun
Inventaris Kantor	25,0%	4 Tahun

Masa manfaat ekonomis, nilai residu dan metode penyusutan direviu setiap akhir tahun dan pengaruh dari setiap perubahan estimasi tersebut berlaku prospektif.

Beban pemeliharaan dan perbaikan dibebankan pada laba rugi pada saat terjadinya. Biaya-biaya lain yang terjadi selanjutnya yang timbul untuk menambah, mengganti atau memperbaiki aset tetap dicatat sebagai biaya perolehan aset jika dan hanya jika besar kemungkinan manfaat ekonomis di masa depan berkenaan dengan aset tersebut akan mengalir ke entitas dan biaya perolehan aset dapat diukur secara andal.

Aset tetap dihentikan pengakuannya pada saat pelepasan atau ketika tidak ada manfaat ekonomis masa depan yang diharapkan timbul dari penggunaan aset secara berkelanjutan. Keuntungan atau kerugian yang timbul dari pelepasan atau penghentian pengakuan suatu aset tetap ditentukan sebagai selisih antara hasil penjualan dan nilai tercatat aset dan diakui dalam laba rugi.

h. Penurunan Nilai Aset Non-Keuangan

Pada akhir setiap periode pelaporan, Perusahaan menelaah nilai tercatat aset non-keuangan untuk menentukan apakah terdapat indikasi bahwa aset tersebut telah mengalami penurunan nilai. Jika terdapat indikasi tersebut, jumlah terpulihkan dari aset diestimasi untuk menentukan tingkat kerugian penurunan nilai (jika ada). Bila tidak memungkinkan untuk mengestimasi jumlah terpulihkan atas suatu aset individual, Perusahaan mengestimasi jumlah terpulihkan dari unit penghasil kas atas aset.

Estimasi jumlah terpulihkan adalah nilai tertinggi antara nilai wajar dikurangi biaya pelepasan dan nilai pakai. Dalam menilai nilai pakainya, estimasi arus kas masa depan didiskontokan ke nilai kini menggunakan tingkat diskonto sebelum pajak yang menggambarkan penilaian pasar kini dari nilai waktu uang dan risiko spesifik atas aset yang mana estimasi arus kas masa depan belum disesuaikan.

PT JAMKRIDA KALSEL

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2021

(Dinyatakan dalam rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI (Lanjutan)

h. Penurunan Nilai Aset Non-Keuangan (lanjutan)

Jika jumlah terpulihkan dari aset nonkeuangan (unit penghasil kas) lebih kecil dari nilai tercatatnya, nilai tercatat aset (unit penghasil kas) diturunkan menjadi sebesar jumlah terpulihkan dan rugi penurunan nilai segera diakui dalam laba rugi.

Ketika penurunan nilai selanjutnya dipulihkan, jumlah tercatat aset (atau unit penghasil kas) ditingkatkan ke estimasi yang direvisi dari jumlah terpulihkannya, namun kenaikan jumlah tercatat tidak boleh melebihi jumlah tercatat ketika kerugian penurunan nilai tidak diakui untuk aset (atau unit penghasil kas) pada tahun-tahun sebelumnya. Pembalikan rugi penurunan nilai diakui segera dalam laba rugi, kecuali aset yang bersangkutan dicatat pada jumlah revaluasi, dalam hal ini pembalikan kerugian penurunan nilai diperlakukan sebagai kenaikan nilai revaluasi.

i. Sewa

Perusahaan menerapkan PSAK No. 73 yang mensyaratkan pengakuan liabilitas sewa sehubungan dengan sewa yang sebelumnya diklasifikasikan sebagai 'sewa operasi'. Kebijakan ini berlaku untuk kontrak yang disepakati atau yang telah berubah, pada atau setelah 1 Januari 2020.

Sebagai penyewa

Pada tanggal permulaan kontrak, Perusahaan menilai apakah kontrak merupakan, atau mengandung, sewa. Suatu kontrak merupakan atau mengandung sewa jika kontrak tersebut memberikan hak untuk mengendalikan penggunaan aset identifikasian selama suatu jangka waktu untuk dipertukarkan dengan imbalan.

Untuk menilai apakah kontrak memberikan hak untuk mengendalikan penggunaan aset identifikasian, Perusahaan harus menilai apakah:

- 1) Perusahaan memiliki hak untuk mendapatkan secara substansial seluruh manfaat ekonomi dari penggunaan aset identifikasian; dan
- 2) Perusahaan memiliki hak untuk mengarahkan penggunaan aset identifikasian. Perusahaan memiliki hak ini ketika Perusahaan dapat memutuskan untuk tujuan apa aset digunakan:
 - Perusahaan memiliki hak untuk mengoperasikan aset;
 - Perusahaan telah mendesain aset dengan cara menetapkan sebelumnya bagaimana dan untuk tujuan apa aset akan digunakan selama periode penggunaan.

Pada tanggal awal dimulainya kontrak atau pada tanggal penilaian kembali atas kontrak yang mengandung sebuah komponen sewa, Perusahaan mengalokasikan imbalan dalam kontrak ke masing-masing komponen sewa berdasarkan harga tersendiri relatif dari komponen sewa dan harga tersendiri agregat dari komponen nonsewa.

Pada tanggal permulaan sewa, Perusahaan mengakui aset hak-guna dan liabilitas sewa. Aset hak-guna diukur pada biaya perolehan, dimana meliputi jumlah pengukuran awal liabilitas sewa yang disesuaikan dengan pembayaran sewa yang dilakukan pada atau sebelum tanggal permulaan

Aset hak-guna kemudian disusutkan menggunakan metode garis lurus dari tanggal permulaan hingga tanggal yang lebih awal antara akhir umur manfaat aset hak-guna atau akhir masa sewa

Liabilitas sewa diukur pada nilai kini pembayaran sewa yang belum dibayar pada tanggal permulaan, didiskontokan dengan menggunakan suku bunga implisit dalam sewa atau jika suku bunga tersebut tidak dapat ditentukan, maka menggunakan suku bunga obligasi pemerintah. Pada umumnya, Perusahaan menggunakan suku bunga obligasi pemerintah sebagai tingkat bunga diskonto.

PT JAMKRIDA KALSEL

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2021

(Dinyatakan dalam rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI (Lanjutan)

i. Sewa (lanjutan)

Pembayaran sewa yang termasuk dalam pengukuran liabilitas sewa meliputi pembayaran berikut ini:

- 1) Pembayaran tetap, termasuk pembayaran tetap secara substansi;
- 2) pembayaran sewa variabel yang bergantung pada indeks atau suku bunga yang pada awalnya diukur dengan menggunakan indeks atau suku bunga pada tanggal permulaan;
- 3) jumlah yang diperkirakan akan dibayarkan oleh penyewa dengan jaminan nilai residual;
- 4) harga eksekusi opsi beli jika Perusahaan cukup pasti untuk mengeksekusi opsi tersebut; dan
- 5) penalti karena penghentian awal sewa kecuali jika Perusahaan cukup pasti untuk tidak menghentikan lebih awal.

Pembayaran sewa dialokasikan menjadi bagian pokok dan biaya keuangan. Biaya keuangan dibebankan pada laba rugi selama periode sewa sehingga menghasilkan tingkat suku bunga periodik yang konstan atas saldo liabilitas untuk setiap periode.

Jika perusahaan pembayaran mengalihkan kepemilikan aset pendasar kepada Perusahaan pada akhir masa sewa atau jika biaya perolehan aset hak-guna merefleksikan Perusahaan aka mengeksekusi opsi beli, maka Perusahaan menyusutkan aset hakguna dari tanggal permulaan hingga akhir umur manfaat aset pendasar. Jika tidak, maka Perusahaan menyusutkan aset hak- guna dari tanggal permulaan hingga tanggal yang lebih awal antara akhir umur manfaat aset hak-guna atau akhir masa sewa.

Sewa Jangka Pendek

Perusahaan memutuskan untuk tidak mengakui aset hak-guna dan liabilitas sewa untuk sewa jangka- pendek yang memiliki masa sewa 12 bulan atau kurang. Perusahaan mengakui pembayaran sewa atas sewa tersebut sebagai beban dengan dasar garis lurus selama masa sewa.

j. Aset Takberwujud

Aset takberwujud dicatat sebesar biaya perolehan dikurangi akumulasi amortisasi. Perusahaan menggunakan metode proporsional berdasarkan pendapatan bancassurance selama 8 (delapan) tahun, mengikuti penelaahan pola manfaat aset. Masa manfaat dan metode amortisasi direvisi setiap akhir tahun.

k. Biaya Dibayar di Muka

Biaya dibayar di muka diamortisasi selama masa manfaat masing-masing biaya dengan menggunakan metode garis lurus. Beban *co guarantee* dibayar dimuka dialokasikan secara proporsional mengikuti pola pengakuan pendapatan Imbal Jasa Penjaminan (IJP).

l. Utang Klaim

Utang klaim adalah utang yang timbul atas klaim yang diajukan oleh tertanggung yang belum dibayar oleh Perusahaan. Utang klaim diakui dan dicatat pada saat klaim disetujui untuk dibayar (*claim settled*). Utang klaim dinyatakan sebesar prosentase penjaminan atas baki debit pinjaman yang macet.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI (Lanjutan)

m. Cadangan Klaim

Cadangan klaim diukur sebesar jumlah estimasi berdasarkan perhitungan teknis penjaminan, dan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 2/POJK.5/2017.

Pada akhir periode pelaporan, Perusahaan menilai apakah cadangan yang diakui telah mencukupi dengan menggunakan estimasi sesuai dengan POJK No.2/POJK.5/2017. Jika nilai tercatat cadangan klaim lebih kecil dibandingkan dengan estimasi cadangan klaim yang telah dibentuk, maka seluruh kekurangan tersebut diakui dalam laba rugi periode berjalan.

n. Imbalan Jasa Penjaminan (IJP) Ditangguhkan

Premi belum merupakan pendapatan adalah bagian dari premi yang belum diakui sebagai pendapatan karena masa pertanggungannya masih berjalan pada akhir periode akuntansi, dan disajikan dalam jumlah bruto. Porsi reasuransi atas premi belum merupakan pendapatan disajikan sebagai bagian dari aset Reasuransi. Premi yang belum merupakan pendapatan diakui setelah periode risiko dengan menggunakan metode harian

o. Pengakuan Pendapatan

Pendapatan IJP diperlakukan dan diakui sebagai pendapatan selama jangka waktu periode pertanggungan. Pendapatan Imbal Jasa Penjaminan (IJP), fee based income bank pelaksana dan beban Co Guarantee diakui pada saat Sertifikat Penjaminan (SP) diterbitkan.

Pendapatan Imbal Jasa Penjaminan, fee based income bank pelaksana dan beban Co Guarantee diakui selama jangka waktu penjaminan dan dialokasikan berdasarkan bulan terbitnya Sertifikat Penjaminan (SP).

Pengakuan Imbal Jasa Penjaminan (IJP), fee based income, biaya komisi agen dan beban Co Guarantee diakui sesuai jangka waktu kredit. Pendapatan Imbal Jasa Penjaminan (IJP) disajikan secara bruto.

Imbal Jasa Penjaminan (IJP) yang sudah diterima namun belum diakui sebagai pendapatan disajikan sebagai IJP yang belum terbit SP. Fee based income bank pelaksana dan beban co guarantee yang sudah dibayarkan namun belum diakui sebagai beban disajikan sebagai beban dibayar dimuka.

p. Pengakuan Beban

Beban klaim penjaminan meliputi klaim disetujui (settled claims), klaim dalam proses penyelesaian termasuk klaim yang terjadi namun belum dilaporkan dan beban penyelesaian klaim. Klaim tersebut diakui sebagai beban klaim pada saat timbulnya liabilitas untuk memenuhi klaim. Bagian klaim reasuransi diakui dan dicatat sebagai pengurang beban klaim pada periode yang sama dengan periode pengakuan beban klaim. Hak subrogasi diakui sebagai pengurang beban klaim pada saat realisasi.

Jumlah klaim dalam proses penyelesaian termasuk klaim yang sudah terjadi namun belum dilaporkan, diakui sebagai estimasi cadangan klaim yang diukur berdasarkan POJK No.2/POJK.5/2017. Perubahan estimasi cadangan klaim, sebagai akibat proses penelaahan lebih lanjut dan perbedaan antara jumlah estimasi klaim dengan klaim yang dibayarkan, diakui dalam laba rugi pada periode terjadinya perubahan.

Porsi reasuransi atas estimasi cadangan klaim ditentukan secara konsisten dengan pendekatan yang digunakan dalam menentukan estimasi cadangan klaim berdasarkan syarat dan ketentuan kontrak reasuransi terkait.

PT JAMKRIDA KALSEL

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2021

(Dinyatakan dalam rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI (Lanjutan)

q. Imbalan Pasca Kerja

Perusahaan memberikan imbalan pasca kerja imbalan pasti untuk karyawan sesuai dengan Undang-undang Ketenagakerjaan No. 13/2003.

Biaya penyediaan imbalan ditentukan dengan menggunakan metode projected unit credit dengan penilaian aktuarial yang dilakukan pada setiap akhir periode pelaporan tahunan. Pengukuran kembali, terdiri dari keuntungan dan kerugian aktuarial, perubahan dampak batas atas aset (jika ada) dan dari imbal hasil atas aset program (tidak termasuk bunga), yang tercermin langsung dalam laporan posisi keuangan yang dibebankan atau dikreditkan dalam penghasilan komprehensif lain periode terjadinya. Pengukuran kembali diakui dalam penghasilan komprehensif lain dan disajikan sebagai pos terpisah pada ekuitas dan tidak akan direklasifikasi ke laba rugi. Biaya jasa lalu diakui dalam laba rugi pada periode amandemen program. Bunga neto dihitung dengan mengalikan tingkat diskonto pada awal periode imbalan pasti dengan liabilitas atau aset imbalan pasti neto. Biaya imbalan pasti dikategorikan sebagai berikut:

- 1) Biaya jasa (termasuk biaya jasa kini, biaya jasa lalu serta keuntungan dan kerugian kurtailmen dan penyelesaian).
- 2) Beban atau pendapatan bunga neto.
- 3) Pengukuran kembali.

Perusahaan menyajikan dua komponen pertama dari biaya imbalan pasti di laba rugi, Keuntungan dan kerugian kurtailmen dicatat sebagai biaya jasa lalu.

Liabilitas untuk pesangon diakui mana yang terjadi lebih dulu ketika entitas tidak dapat lagi menarik penawaran imbalan tersebut dan ketika entitas mengakui biaya restrukturisasi terkait.

r. Pajak Penghasilan

Beban pajak penghasilan merupakan jumlah pajak terutang dan pajak tangguhan.

Pajak kini terutang berdasarkan laba kena pajak tahun berjalan. Laba kena pajak berbeda dari laba sebelum pajak seperti yang dilaporkan dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain karena pos pendapatan atau beban yang dikenakan pajak atau dikurangkan pada tahun yang berbeda dan pos-pos yang tidak pernah dikenakan pajak atau tidak dapat dikurangkan.

Beban pajak kini ditentukan berdasarkan laba kena pajak dalam tahun yang bersangkutan yang dihitung berdasarkan tarif pajak yang berlaku

Pajak tangguhan diakui atas perbedaan temporer antara jumlah tercatat aset dan liabilitas dalam laporan keuangan dengan dasar pengenaan pajak yang digunakan dalam perhitungan laba kena pajak. Liabilitas pajak tangguhan umumnya diakui untuk seluruh perbedaan temporer kena pajak. Aset pajak tangguhan umumnya diakui untuk seluruh perbedaan temporer yang dapat dikurangkan sepanjang kemungkinan besar bahwa laba kena pajak akan tersedia sehingga perbedaan temporer dapat dimanfaatkan. Aset dan liabilitas pajak tangguhan tidak diakui jika perbedaan temporer timbul dari pengakuan awal (selain dari kombinasi bisnis) dari aset dan liabilitas suatu transaksi yang tidak mempengaruhi laba kena pajak atau laba akuntansi. Selain itu, liabilitas pajak tangguhan tidak diakui jika perbedaan temporer timbul dari pengakuan awal *goodwill*.

Aset dan liabilitas pajak tangguhan diukur dengan menggunakan tarif pajak yang diekspektasikan berlaku dalam periode ketika liabilitas diselesaikan atau aset dipulihkan dengan tarif pajak (dan peraturan pajak) yang telah berlaku atau secara substantif telah berlaku pada akhir periode pelaporan.

PT JAMKRIDA KALSEL**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2021

*(Dinyatakan dalam rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)***2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI (Lanjutan)****r. Pajak Penghasilan (lanjutan)**

Pengukuran aset dan liabilitas pajak tangguhan mencerminkan konsekuensi pajak yang sesuai dengan cara Perusahaan memperkirakan, pada akhir periode pelaporan, untuk memulihkan atau menyelesaikan jumlah tercatat aset dan liabilitasnya.

Jumlah tercatat aset pajak tangguhan ditelaah ulang pada akhir periode pelaporan dan dikurangi jumlah tercatatnya jika kemungkinan besar laba kena pajak tidak lagi tersedia dalam jumlah yang memadai untuk mengkompensasikan sebagian atau seluruh aset pajak tangguhan tersebut.

Pajak kini dan pajak tangguhan diakui sebagai beban atau penghasilan dalam laba rugi periode berjalan, kecuali untuk pajak penghasilan yang timbul dari transaksi atau peristiwa yang diakui di luar laba rugi (baik dalam penghasilan komprehensif lain maupun secara langsung di ekuitas), dalam hal tersebut pajak juga diakui di luar laba rugi atau yang timbul dari akuntansi awal kombinasi bisnis. Dalam hal kombinasi bisnis, pengaruh pajak termasuk dalam akuntansi kombinasi bisnis.

3. KAS DAN BANK

Saldo kas dan setara kas per 31 Desember 2021 dan 2020 masing-masing terdiri dari:

	31 Desember 2021	31 Desember 2020
Kas	43.316.019	13.658.894
Bank		
PT Bank BPD Klasel	1.506.963.527	1.330.212.824
PT Bank BPD Klasel Syariah	42.694.194	-
PT Bank BNI 46 (Persero) Tbk	129.477.740	6.861.792
PT Bank Panin Tbk	2.346.362.096	3.535.082.339
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	166.928.898	56.209.800
PT Bank Central Asia Tbk	4.001.446.577	-
PT Bank Bukopin Tbk	73.177.363	-
PT Bank Maybank Indonesia Tbk	39.939.478	-
PT Bank NationalNOBU Tbk	65.696.788	16.393.048
Total	8.416.002.681	4.958.418.698

PT JAMKRIDA KALSEL**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2021

*(Dinyatakan dalam rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)***4. INVESTASI JANGKA PENDEK**

Saldo investasi jangka pendek perusahaan per 31 Desember 2021 dan 2020 masing-masing terdiri dari:

a. Deposito

	31 Desember 2021	31 Desember 2020
PT Bank BPD Klasel	16.500.000.000	55.600.000.000
PT Bank NationalNOBU Tbk	1.000.000.000	3.000.000.000
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	10.000.000.000	-
PT Bank BPD Klasel Syariah	2.000.790.000	-
PT BPRS Barkah Gemadana	4.500.000.000	-
Total Deposito	34.000.790.000	58.600.000.000

Klasifikasi deposito berjangka berdasarkan periode adalah sebagai berikut:

	31 Desember 2021	31 Desember 2020
Jangka Waktu 1 Bulan	30.000.790.000	43.100.000.000
Jangka Waktu 2 Bulan	2.000.000.000	1.000.000.000
Jangka Waktu 3 Bulan	2.000.000.000	14.500.000.000
Total Deposito	34.000.790.000	58.600.000.000

Tingkat suku bunga rata-rata deposito untuk tahun 2021 adalah sebesar 3,27% per tahun.

b. Saham yang diperdagangkan

	31 Desember 2021	31 Desember 2020
Saham yang diperdagangkan	8.887.191.100	2.169.465.500
Total Saham	8.887.191.100	2.169.465.500
Total Investasi Jangka Pendek	42.887.981.100	60.769.465.500

PT JAMKRIDA KALSEL**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2021

*(Dinyatakan dalam rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)***4. INVESTASI JANGKA PENDEK (Lanjutan)**

Pengukuran Nilai Wajar Saham

Per 31 Desember 2021

Kode Saham	Harga Perolehan		H. Pasar	Nilai Wajar	
	Lembar	Nominal		Nilai Wajar	Laba (Rugi)
PGAS	294.000	499.800.000	1.375	404.250.000	(95.550.000)
WIKA	246.000	499.380.000	1.105	271.830.000	(227.550.000)
KRAS	1.413.300	1.036.254.000	412	582.279.600	(453.974.400)
HMSP	165.200	199.892.000	965	159.418.000	(40.474.000)
POWR	147.000	99.960.000	615	90.405.000	(9.555.000)
EMTK	184.100	499.884.000	2.280	419.748.000	(80.136.000)
TOWR	1.285.300	1.543.869.500	1.125	1.445.962.500	(97.907.000)
ITMG	23.000	598.000.000	20.400	469.200.000	(128.800.000)
BBRI	446.000	1.886.780.000	4.110	1.833.060.000	(53.720.000)
JSMR	190.000	799.900.000	3.890	739.100.000	(60.800.000)
KLBF	308.000	495.880.000	1.615	497.420.000	1.540.000
BBCA	80.000	592.000.000	7.300	584.000.000	(8.000.000)
MAPI	300.000	247.500.000	710	213.000.000	(34.500.000)
MTEL	937.600	750.080.000	830	778.208.000	28.128.000
MNCN	415.000	398.400.000	900	373.500.000	(24.900.000)
TAYS	145.000	52.200.000	178	25.810.000	(26.390.000)
Total		10.199.779.500		8.887.191.100	(1.312.588.400)

5. PIUTANG USAHA

Saldo piutang usaha perusahaan per 31 Desember 2021 dan 2020 masing-masing terdiri dari:

	31 Desember 2021	31 Desember 2020
Piutang Co Guarantee - Al Amin	2.737.803.480	2.262.718.273
Piutang Co Guarantee - Jamkrindo	1.078.952.860	1.078.952.860
Piutang Co Guarantee - Ignasia	11.867.423.421	5.004.438.502
Piutang Co Guarantee - Jakre	861.160.278	182.962.003
Total	16.545.340.039	8.529.071.638

Pada tahun 2021 dan 2020 manajemen belum membentuk cadangan kerugian piutang tak tertagih sesuai PSAK 71 tentang instrumen keuangan. Sehingga saldo Piutang yang disajikan belum memperhitungkan kerugian yang akan timbul dari piutang tidak tertagih.

PT JAMKRIDA KALSEL**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2021

*(Dinyatakan dalam rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)***6. PIUTANG LAIN-LAIN**

Saldo piutang lain-lain perusahaan per 31 Desember 2021 dan 2020 masing-masing terdiri dari:

	31 Desember 2021	31 Desember 2020
Piutang Bunga Obligasi	198.451.500	106.459.500
Akrual Piutang Bunga Obligasi dan Deposito	79.931.805	-
IJP Restitusi	43.819.649	-
Piutang Lain-lain	23.000.000	60.326.105
Total	345.202.954	166.785.605

7. PENDAPATAN YANG MASIH HARUS DITERIMA

Saldopendapatan yang masih harus diterima perusahaan per 31 Desember 2021 dan 2020 masing-masing terdiri dari:

	31 Desember 2021	31 Desember 2020
Piutang Komisi Jakre	123.534.471	86.797.986
Piutang Komisi Igna	-	40.843.351
Piutang Komisi Paragon	74.068.925	-
Piutang Komisi Al Amin	24.131.696	-
Total	221.735.092	127.641.337

8. BIAYA DIBAYAR DIMUKA

Saldo beban dibayar dimuka perusahaan per 31 Desember 2021 dan 2020 masing-masing terdiri dari:

	31 Desember 2021	31 Desember 2020
Jangka Pendek		
<i>Fee Based Income</i>	380.944.298	124.578.445
Fee Agen	566.933.251	181.261.714
<i>Co Guarantee</i>	161.548.597	876.814.837
Beban Kerugian Pembelian ORI	1.123.808.910	717.246.098
Asuransi Kendaraan	29.828.019	-
Sub Total	2.263.063.075	1.899.901.094
Jangka Panjang		
<i>Fee Based Income</i>	5.960.585.393	5.767.700.894
Fee Agen	6.377.824.761	6.476.823.522
<i>Co Guarantee</i>	36.569.882.895	32.852.893.816
Sub Total	48.908.293.049	45.097.418.232
Total	51.171.356.124	46.997.319.326

PT JAMKRIDA KALSEL**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2021

*(Dinyatakan dalam rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)***9. INVESTASI JANGKA PANJANG**

Saldo investasi jangka panjang perusahaan per 31 Desember 2021 dan 2020 masing-masing terdiri dari:

	31 Desember 2021	31 Desember 2020
Obligasi Republik Indonesia (ORI)		
PT RHB Securitas Indonesia	23.289.441.450	17.996.052.980
PT Bank Mybank Indonesia Tbk	11.661.490.000	-
Reksadana		
PT MNC Securities Tbk	3.500.000.000	-
PT Bank Mybank Indonesia Tbk	3.000.000.000	-
Total	41.450.931.450	17.996.052.980

Daftar Rincian Obligasi Republik Indonesia (Nilai Nominal)

Per 31 Desember 2021						
ID Obligasi	Harga Perolehan			Nilai Wajar		
	Bunga	Nominal	Jth. Tempo	Tarif	Nilai Pasar	Laba (Rugi)
FR0087	6,50%	4.000.000.000	2031-02-15	101%	4.039.661.720	39.661.720
FR0087	6,50%	2.000.000.000	2031-02-15	101%	2.019.830.860	19.830.860
FR0087	6,50%	5.000.000.000	2031-02-15	101%	5.049.577.150	49.577.150
FR0087	6,50%	4.000.000.000	2031-02-15	101%	4.039.661.720	39.661.720
FR0065	6,63%	2.000.000.000	2033-05-15	101%	2.018.050.000	18.050.000
FR0065	6,63%	2.000.000.000	2033-01-15	101%	2.018.050.000	18.050.000
FR0088	6,25%	1.000.000.000	2036-06-15	102%	1.017.500.000	17.500.000
FR0076	7,38%	800.000.000	2048-05-15	105%	840.240.000	40.240.000
FR0092	7,13%	3.500.000.000	2042-06-15	104%	3.648.750.000	148.750.000
FR0092	7,13%	2.000.000.000	2042-06-15	103%	2.052.305.000	52.305.000
FR0092	7,13%	2.000.000.000	2042-06-15	103%	2.052.305.000	52.305.000
FR0088	6,25%	1.000.000.000	2036-06-15	102%	1.017.500.000	17.500.000
FR0089	6,88%	3.000.000.000	2051-08-15	103%	3.082.500.000	82.500.000
FR0089	6,88%	2.000.000.000	2051-08-15	103%	2.055.000.000	55.000.000
Total		34.300.000.000			34.950.931.450	650.931.450

Per 31 Desember 2020						
ID Obligasi	Harga Perolehan			Nilai Wajar		
	Bunga	Nominal	Jth. Tempo	Tarif	Nilai Pasar	Laba (Rugi)
FR0074	7,50%	1.000.000.000	2032-08-15	100%	1.000.000.000	-
FR0080	7,50%	7.000.000.000	2035-06-15	100%	7.000.000.000	-
FR0080	7,50%	2.000.000.000	2035-06-15	100%	2.000.000.000	-
FR0083	7,50%	6.000.000.000	2040-04-15	100%	6.000.000.000	-
FR0065	6,63%	1.996.052.980	2033-05-15	100%	1.996.052.980	-
Total		17.996.052.980			17.996.052.980	-

PT JAMKRIDA KALSEL**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2021

*(Dinyatakan dalam rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)***10. ASET TETAP**

Saldo aset tetap perusahaan per 31 Desember 2021 dan 2020 terdiri dari:

	31 Desember 2021			
	Saldo Awal	Penambahan	Pengurangan	Saldo Akhir
<u>Biaya Perolehan</u>				
Aset Hak Guna Bagunan	203.400.005	-	-	203.400.005
Kendaraan	912.424.560	578.101.000	-	1.490.525.560
Peralatan Kantor	1.416.994.247	96.174.550	-	1.513.168.797
Total Biaya Perolehan	2.532.818.812	674.275.550	-	3.207.094.362
<u>Akumulasi Penyusutan</u>				
Aset Hak Guna Bagunan	75.441.667	80.300.004	-	155.741.671
Kendaraan	517.144.351	460.236.667	-	977.381.018
Peralatan Kantor	932.443.337	196.642.242	-	1.129.085.579
Total Akumulasi Penyusutan	1.525.029.355	737.178.913	-	2.262.208.268
Nilai Buku	1.007.789.457			944.886.094

	31 Desember 2020			
	Saldo Awal	Penambahan	Pengurangan	Saldo Akhir
<u>Biaya Perolehan</u>				
Aset Hak Guna Bagunan	187.500.005	15.900.000	-	203.400.005
Kendaraan	1.455.281.560	-	-	912.424.560
Peralatan Kantor	1.154.200.947	262.793.300	-	1.416.994.247
Total Biaya Perolehan	2.796.982.512	278.693.300	-	2.532.818.812
<u>Akumulasi Penyusutan</u>				
Aset Hak Guna Bagunan	-	-	-	75.441.667
Kendaraan	17.407.192	499.737.159	-	517.144.351
Peralatan Kantor	812.846.135	119.597.202	-	932.443.337
Total Akumulasi Penyusutan	830.253.327	619.334.361	-	1.525.029.355
Nilai Buku	1.966.729.185			1.007.789.457

Perusahaan menyewa tanah dan bangunan milik sesuai dengan Keputusan Gubernur Kalimantan Selatan No: 188.44/0896/KUM/2019 tanggal 21 November 2019 tentang "Penetapan Perpanjangan Sewa Tanah dan Bangunan Barang Milik Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan yang Terletak di Jalan Haryono MT Kepada Perseroan Terbatas Jaminan Kredit Daerah Kalimantan Selatan" dan Perjanjian sewa tanah dan bangunan yang dilakukan oleh PT Jamkrida Kalsel dengan Abdul Haris selaku Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Selatan dalam hal ini bertindak dalam jabatannya untuk dan atas nama Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan berkedudukan di Jalan Dharma Praja Banjarbaru no. 032/781.a-Pentan/BMD-Bakeuda/2019. Dengan Luas 737 m², Jangka Waktu 3 tahun dihitung sejak 20 Juni 2019 sampai dengan 20 Juni 2022, dengan biaya sewa sebesar Rp75.000.000 per tahun.

PT JAMKRIDA KALSEL**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2021

*(Dinyatakan dalam rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)***11. ASET TIDAK BERWUJUD**

Saldo aset tidak berwujud perusahaan per 31 Desember 2021 dan 2020 terdiri dari:

	31 Desember 2021			
	Saldo Awal	Penambahan	Pengurangan	Saldo Akhir
<u>Biaya Perolehan</u>				
Software	347.600.000	-	-	347.600.000
Total Biaya Perolehan	347.600.000	-	-	347.600.000
<u>Akumulasi Amortisasi</u>				
Software	258.954.171	40.749.997	-	299.704.168
Total Akumulasi Penyusutan	258.954.171	40.749.997	-	299.704.168
Nilai Buku	88.645.829			47.895.832

	31 Desember 2020			
	Saldo Awal	Penambahan	Pengurangan	Saldo Akhir
<u>Biaya Perolehan</u>				
Software	324.600.000	23.000.000	-	347.600.000
Total Biaya Perolehan	324.600.000	23.000.000	-	347.600.000
<u>Akumulasi Amortisasi</u>				
Software	233.961.668	24.992.503	-	258.954.171
Total Akumulasi Penyusutan	233.961.668	24.992.503	-	258.954.171
Nilai Buku	90.638.332			88.645.829

12. IJP YANG DITANGGUHKAN

Saldo IJP yang ditangguhkan perusahaan per 31 Desember 2021 dan 2020 masing-masing terdiri dari:

	31 Desember 2021	31 Desember 2020
Jangka Pendek		
Telah terbit Sertifikat Penjaminan	5.640.502.837	4.278.604.683
Sub Total	5.640.502.837	4.278.604.683
Jangka Panjang		
Telah terbit Sertifikat Penjaminan	58.248.518.164	55.116.021.009
Belum Terbit Sertifikat Penjaminan	4.854.229.979	3.212.517.971
Sub Total	63.102.748.143	58.328.538.980
Total	68.743.250.980	62.607.143.663

Saldo IJP ditangguhkan per 31 Desember 2021 dan 2020 merupakan saldo penerimaan IJP yang belum diakui sebagai pendapatan, yang dihitung sesuai dengan tarif IJP sesuai dengan jangka waktu kreditnya (dalam tahun) dikalikan dengan flatfon kredit. IJP ditangguhkan akan diakui sebagai pendapatan sesuai masa pertanggungan.

PT JAMKRIDA KALSEL**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2021

*(Dinyatakan dalam rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)***13. UTANG CO GUARANTEE**

Saldo utang *co guarantee* perusahaan per 31 Desember 2021 dan 2020 merupakan utang atas penjaminan ulang yang dilakukan oleh Perusahaan dengan Perusahaan penjaminan lain, sesuai dengan perjanjian kerjasama kedua belah pihak. Saldo utang *co guarantee* per 31 Desember 2021 dan 2020 masing-masing sebesar Rp4.158.813.615 dan Rp2.504.989.589.

14. UTANG PAJAK

Saldo utang pajak perusahaan per 31 Desember 2021 dan 2020 adalah sebagai berikut:

	31 Desember 2021	31 Desember 2020
PPh Pasal 21	141.809.346	108.842.066
PPh Pasal 23	1.054.139	-
PPh Pasal 29	-	176.704.372
Total Kewajiban Segera	142.863.485	285.546.438

Rekonsiliasi fiskal laporan komersial dan laporan fiskal adalah sebagai berikut:

	2021	2020
Laba (Rugi) Sebelum Pajak	(2.913.207.028)	3.058.351.298
Beda Tetap		
Pendapatan Bunga		
Beda Temporer		
Bean Imbalan Kerja	4.950.000	4.950.000
Penghasilan Kena Pajak (PKP)	(2.908.257.028)	3.063.301.298
Pajak Terutang		
Non Fasilitas 22%	-	673.926.286
Pajak terutang	-	673.926.286
dikurangi kredit pajak:		
PPh pasal 25	-	497.221.913
PPh Pasal 29/(28A)	-	176.704.373

PT JAMKRIDA KALSEL**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2021

*(Dinyatakan dalam rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)***15. UTANG KOMISI**

Saldo utang komisi perusahaan per 31 Desember 2021 dan 2020 adalah sebagai berikut:

	31 Desember 2021	31 Desember 2020
<i>Fee Based Income</i>	469.094.789	-
Fee Agen	579.779.768	48.587.528
Tota	1.048.874.557	48.587.528

fee base income merupakan utang kepada PT Bank BPD Kalsel berdasarkan perjanjian kedua belah pihak dan dituangkan dalam perjanjian kerjasama. besaran tarif yang telah disepakati adalah 5% untuk penjaminan kredit umum, penjaminan kredit mikro, penjaminan kredit konstruksi dan pengadaan barang/jasa, dan 10% untuk penjaminan kredit multiguna dari Imbal Jasa Penjaminan (IJP) dan dibebankan sesuai dengan manfaat yang Fee Agen diberikan kepada pihak ketiga selaku komisi penjamin ulang perusahaan yang diberikan sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak dan dituangkan dalam perjanjian kerjasama. besaran tarif yang telah disepakati adalah 10% dari Imbal Jasa Penjaminan (IJP) untuk penjaminan kredit multiguna efektif per 21 Juli 2017, 15% dari Imbal Jasa Penjaminan (IJP) untuk penjaminan kredit umum, penjaminan kredit mikro, penjaminan kredit konstruksi dan pengadaan barang/jasa, dan 20% dari Imbal Jasa Penjaminan (IJP) untuk penjamin bank garansi dan surety bond, serta pembebanan dilakukan sesuai dengan manfaat yang diperoleh.

16. CADANGAN KLAIM

Per 31 Desember 2021 dan 2020 perusahaan membentuk cadangan klaim sebesar Rp5.147.904.057 dan Rp368.770.354.

Cadangan klaim merupakan estimasi beban klaim yang akan dibayarkan perusahaan dimasa yang akan datang, yang dihitung berdasarkan POJK Nomor: 2/POJK.5/2017. Pada pasal 22 POJK ini dijelaskan ada dua metode

- 1) 0,01% (nol koma nol satu per seratus) dari nilai Penjaminan yang ditanggung sendiri; atau
- 2) penjumlahan dari 100% (seratus per seratus) dari nilai Penjaminan yang ditanggung sendiri pada saat Klaim dilaporkan, dengan Klaim yang sudah terjadi tetapi belum dilaporkan (*incurred but not reported*).

Klaim yang sudah terjadi tetapi belum dilaporkan (*incurred but not reported*), dihitung berdasarkan rata-rata Klaim ditanggung sendiri yang telah dibayarkan pada 3 (tiga) bulan terakhir.

17. LIABILITAS LANCAR LAINNYA

Saldo liabilitas lancarperusahaan per 31 Desember 2021 dan 2020 adalah sebagai berikut:

	31 Desember 2021	31 Desember 2020
Hutang Subrogasi		
Jamkrindo	181.349.875	368.428.200
Igna Asia	181.218.750	720.408.582
Jakre	1.698.783.365	153.954.054
Hutang Asuransi	79.194.780	-
Hutang IJP Restitusi	74.098.159	-
Hutang Lancar Lain-lain	57.230.220	580.868.777
Tota	2.271.875.149	1.823.659.613

PT JAMKRIDA KALSEL**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2021

*(Dinyatakan dalam rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)***17. KEWAJIBAN IMBALAN KERJA**

Perusahaan menghitung imbalan pasca kerja imbalan pasti untuk karyawan sesuai dengan Undang-undang Ketenagakerjaan No. 13/2003 dan peraturan Perusahaan. Jumlah karyawan yang berhak memperoleh imbalan pasca kerja tersebut adalah 563 dan 547 karyawan pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020.

Saldo kewajiban imbalan kerja perusahaan per 31 Desember 2021 dan 2020 adalah sebagai berikut:

	31 Desember 2021	31 Desember 2020
Nilai Kini Kwajiban Awal Tahun	135.731.673	89.180.742
Biaya jasa kini	27.260.705	26.849.683
Biaya Bunga	9.804.374	7.026.041
Keuntungan (Kerugian) Aktuarial	12.055.541	12.675.207
Pembayaran Manfaat	(21.812.406)	-
Nilai Kini Kewajiban Akhir	163.039.887	135.731.673
Cadangan Pensiun Dewan Komisaris dan Direksi	568.160.000	425.000.000
Total Liabilitas Imbalan Pasca Kerja	731.199.887	560.731.673

Perhitungan imbalan pasca kerja dilakukan oleh Kantor Konsultan Aktuaria Tubagus Syafrial & Amran Nagasan dengan No.941/PSAK-TBA.AN/XII-2021 yang diterbitkan tanggal 10 Desember 2021 dengan menggunakan asumsi utama sebagai berikut:

	2021	2020
Tingkat Diskonto	7,08%	7,22%
Kenaikan Gaji per Tahun	5%	5%
Tingkat Mortalita	TMII 2019	TMII 2011
Tingkat Cacat	10% TMI IV 2019	10% TMI 2011
Tingkat Pengunduran Diri	1% mulai usia 18 sampai 0% di usia 55	1% mulai usia 18 sampai 0% di usia 55
Usia Pensiun Normal	55 Tahun	55 Tahun

19. EKUITAS

Saldo ekuitas perusahaan per 31 Desember 2021 dan 2020 adalah sebagai berikut:

	31 Desember 2021	31 Desember 2020
Modal disetor	70.020.000.000	70.020.000.000
Tambahan Modal Disetor	12.000.000.000	-
Cadangan umum	609.267.610	-
Cadangan Tujuan	97.853.522	-
Saldo laba ditahan	(2.913.207.028)	2.437.070.438
Penghasilan Komprehensif Lain	(17.143.321)	(5.087.780)
Total	79.796.770.783	72.451.982.658

PT JAMKRIDA KALSEL**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2021

*(Dinyatakan dalam rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)***20. PENDAPATAN**

Saldo pendapatan perusahaan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2021 dan 2020 adalah sebagai berikut:

	2021	2020
Pendapatan Jasa Penjaminan Bank	11.202.704.938	10.317.115.220
Pendapatan Jasa Penjaminan Non Bank	795.939.120	762.380.297
Pendapatan Komisi <i>Co Guarantee</i>	449.848.966	396.041.329
Total	12.448.493.024	11.475.536.846

Pendapatan Imbal Jasa Penjaminan (IJP) adalah premi yang diterima oleh Perusahaan dari terjamin dalam rangka kegiatan usaha penjaminan. Besarnya IJP dihitung dari tarif IJP, plafond kredit/pembiayaan dan jangka waktu kredit/pembiayaan.

21. BEBAN KLAIM

Saldo beban klaim perusahaan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2021 dan 2020 adalah sebagai berikut:

	2021	2020
Beban Cadangan Klaim	4.779.133.703	-
Pendapatan Jasa Penjaminan Bank	317.114.381	1.859.749.203
Pendapatan Jasa Penjaminan Non Bank	2.021.681.293	2.198.745.998
Beban <i>Co Guarantee</i>	978.743.269	5.471.011.127
Beban Fee Based Income	1.522.583.548	863.675.493
Beban Fee Agen	5.813.655.732	1.387.306.188
Total	15.432.911.926	11.780.488.009

PT JAMKRIDA KALSEL**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2021

*(Dinyatakan dalam rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)***22. PENDAPATAN OPERASIONAL LAINNYA**

Saldo Pendapatan operasional perusahaan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2021 dan 2020 adalah sebagai berikut:

	2021	2020
Pendapatan Bunga Jasa Giro	103.440.406	105.562.454
Pendapatan Bunga Deposito	1.228.419.897	2.375.173.809
Pendapatan Bunga Obligasi	1.070.574.040	1.217.844.775
Pendapatan Reksadana	212.494.550	240.712.056
Pendapatan Dividen	196.223.668	16.069.250
Pendapatan Trading Obligasi	1.775.666.182	1.240.306.364
Agio Saham	1.482.084.406	2.052.747.775
Pendapatan Kelebihan Cadangan Klaim	-	347.800.002
Pendapatan Lain-lain	106.018.098	36.900.212
Total	6.174.921.248	7.633.116.697

23. BEBAN OPERASIONAL

Saldo beban operasional perusahaan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2021 dan 2020 adalah sebagai berikut:

	2021	2020
a. Beban Tenaga Kerja		
Gaji dan Tunjangan Direksi dan Komisaris	1.032.354.023	856.918.440
Gaji Karyawan	646.676.976	594.517.574
THR Direksi dan Komisaris	100.640.000	-
Tunjangan Karyawan	1.001.258.889	681.840.563
Perjalanan Dinas	87.950.996	129.573.859
Honorarium	135.098.203	153.482.210
BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan	249.746.632	198.661.090
Karyawan Lainy	857.970.108	737.485.282
Beban Imbalan Kerja	460.558.415	514.005.489
	4.572.254.242	3.866.484.507
b. Beban Penyusutan dan Amortisasi		
Beban Penyusutan Aset Tetap	737.178.913	823.808.396
Beban Amortisasi Aset Takberwujud	40.749.997	36.437.503
	777.928.910	860.245.899

PT JAMKRIDA KALSEL**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2021

*(Dinyatakan dalam rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)***23. BEBAN OPERASIONAL (Lanjutan)**

	2021	2020
c. Beban Administrasi dan Umum		
Beban Jasa Profesional	93.598.635	80.953.500
Telepon, Air, dan Listrik	55.793.315	59.058.939
Perbaikan dan pemeliharaan	79.194.543	137.233.989
Biaya Kantor	221.953.545	192.479.879
Alat Tulis Kantor	84.317.588	51.776.708
Pemasaran dan Promosi	119.687.064	66.699.100
Beban Amortisasi Kerugian Pembelian ORI	469.016.868	26.047.357
Beban Amortisasi Asuransi Kendaraan	664.368.588	-
Biaya Lain-Lain	176.890.672	205.751.772
	1.964.820.818	820.001.244
d. Beban Operasional Lain	-	-
Beban Administrasi Bank	42.244.205	42.301.238
Total	7.357.248.175	5.589.032.888

24. PENDAPATAN DAN BEBAN NON OPERASIONAL LAINYA

Saldo pendapatan dan beban non operasional lainnya perusahaan yang berakhir pada 31 Desember 2021 dan 2020 adalah sebagai berikut:

	2021	2020
Pendapatan Subrogasi	1.253.538.801	1.319.218.652
Toral pendapatan (beban) non operasional bersih	1.253.538.801	1.319.218.652

25. PIHAK BERELASI

Dalam kegiatan usahanya, Perusahaan melakukan transaksi tertentu dengan pihak berelasi, dimana manajemen berpendapat transaksi dengan pihak berelasi dilakukan dengan kondisi dan persyaratan yang sama dengan pihak ketiga, yang meliputi:

Nama Pihak Berelasi	Sifat Hubungan	Transaksi
PT Bank BPD Kalsel	Entitas Sepengendalian	Giro, Deposito, dan Penjaminan
Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan	Pemegang saham	Ekuitas
Koperasi Karyawan Bank BPD Kalsel	Pemegang saham	Ekuitas

PT JAMKRIDA KALSEL

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2021

(Dinyatakan dalam rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

26. KEJADIAN SETELAH TANGGAL PELAPORAN

Sampai dengan laporan keuangan ini diotorisasi untuk di terbitkan, tidak ada kejadian setelah tanggal pelaporan per 31 Desember 2021 dan 2020 yang dapat mempengaruhi laporan keuangan secara signifikan dan perlu diungkapkan oleh perusahaan.

27. PERSETUJUAN PENERBITAN LAPORAN KEUANGAN

Manajemen perusahaan bertanggung jawab atas penyajian dan pengungkapan laporan keuangan untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2021 dan 2020 telah diotorisasi untuk diterbitkan pada tanggal 23 Maret 2022 dan 12 Maret 2021



KAP SANDRA PRACIPTA, CPA

Registered Public Accountants

Decree of the Finance Minister of the Republic of Indonesia

No.378/KM.1/2019

LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN

No. 00017/2.1269/AU.2/08/1394-2/1/III/2022

Pemegang Saham, Dewan Komisaris, dan Direksi

PT Jamkrida Kalsel

Kami telah mengaudit laporan keuangan PT Jamkrida Kalsel yang terlampir, terdiri dari laporan posisi keuangan tanggal 31 Desember 2021, serta laporan laba-rugi dan penghasilan komprehensif lain, laporan perubahan ekuitas, dan laporan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, dan suatu ikhtisar kebijakan akuntansi signifikan dan informasi penjelasan lainnya.

Tanggung Jawab Manajemen atas Laporan Keuangan

Manajemen bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, dan atas pengendalian internal yang dianggap perlu oleh manajemen untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Tanggung Jawab Auditor

Tanggung jawab kami adalah untuk menyatakan suatu opini atas laporan keuangan tersebut berdasarkan audit kami. Kami melaksanakan audit kami berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Standar tersebut mengharuskan kami untuk mematuhi ketentuan etika serta merencanakan dan melaksanakan audit untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan bebas dari kesalahan penyajian material.

Suatu audit melibatkan pelaksanaan prosedur untuk memperoleh bukti audit tentang angka-angka dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Prosedur yang dipilih bergantung pada pertimbangan auditor, termasuk penilaian atas risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan. Dalam melakukan penilaian risiko tersebut, auditor mempertimbangkan pengendalian internal yang relevan dengan penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan entitas untuk merancang prosedur audit yang tepat sesuai dengan kondisinya, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas keefektifitasan pengendalian internal entitas. Suatu audit juga mencakup pengevaluasian atas ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan dan kewajiban estimasi akuntansi yang dibuat oleh manajemen, serta pengevaluasian atas penyajian laporan keuangan secara keseluruhan.

Kami yakin bahwa bukti audit yang telah kami peroleh adalah cukup dan tepat untuk menyediakan suatu basis bagi opini audit kami.

Alamat Kantor : Perumahan Mega Asri No. B3,
Jl. Garuda, Dayakan, Sardonoharjo, Ngaglik, Sleman, Yogyakarta. 55581

Telp. 0274 - 7371714

Email : Sandrapracipta@gmail.com

www.kapsandrapracipta.com



KAP SANDRA PRACIPTA, CPA

Registered Public Accountants

Decree of the Finance Minister of the Republic of Indonesia

No.378/KM.1/2019

Basis untuk opini wajar dengan pengecualian

Sebagaimana dijelaskan dalam catatan atas laporan keuangan No. 5 bahwa PT Jamkrida Kalsel atas laporan keuangan pada tahun 2021, Perusahaan belum membentuk penyisihan kerugian piutang sebagaimana diatur dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 71 (Revisi 2017) mengenai "Instrumen Keuangan". Dampak atas tidak dibentuknya penyisihan kerugian piutang tersebut terhadap laporan keuangan tidak dapat ditentukan.

Opini

Menurut opini kami, kecuali untuk dampak hal yang dijelaskan dalam paragraf basis untuk opini wajar dengan pengecualian, laporan keuangan terlampir menyajikan secara wajar dalam hal semua yang material, posisi keuangan PT Jamkrida Kalsel tanggal 31 Desember 2021, serta kinerja keuangan dan arus kasnya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

Hal lain

Audit kami atas laporan keuangan PT Jamkrida Kalsel tanggal 31 Desember 2021 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut dilaksanakan dengan tujuan untuk merumuskan suatu opini atas laporan keuangan tersebut secara keseluruhan.

KAP SANDRA PRACIPTA, CPA



Sandra Pracipta, S.E., Ak., CA., CPA., AseanCPA.
NRAP.1694

Yogyakarta, 23 Maret 2022

